



STUDI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU)

Oleh: Irma Novayani, M.Pd.I

Abstrak

*Kata Kunci: Pengembangan Pendidikan Agama Islam, Perguruan Tinggi Umum
Pemahaman tentang Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah atau perguruan tinggi dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu PAI sebagai aktivitas dan PAI sebagai fenomena. PAI sebagai aktivitas berarti upaya yang secara sadar dirancang untuk membantu seseorang atau sekelompok orang dalam mengembangkan pandangan hidup (bagaimana orang akan menjalani dan memanfaatkan hidup dan kehidupannya), sikap hidup, dan keterampilan hidup, baik yang bersifat manual (petunjuk praktis) maupun mental dan sikap sosial yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran serta nilai-nilai Islam. Sedangkan PAI sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan antara dua orang atau lebih dan/atau penciptaan suasana yang dampaknya ialah berkembangnya suatu pandangan hidup yang bernafaskan atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai Islam, yang diwujudkan dalam sikap hidup serta keterampilan hidup pada salah satu atau beberapa pihak.*

Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) antara di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan di Perguruan Tinggi Umum (PTU) sangatlah berbeda. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang berbeda dari dua kelompok perguruan tinggi tersebut, dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yaitu mencetak para ahli agama (ulama) dalam semua tingkat, kurikulumnya juga lebih dominan menekankan aspek keagamaan Islam serta nuansa dan lingkungan yang religius juga lebih kentara (tampak) di kampus atau universitas yang berciri khas agama Islam.

Berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU), dimana bertujuan untuk memenuhi kewajiban setiap orang mengetahui dasar-dasar ajaran agamanya sebagai seorang pemeluk agama, kurikulum pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) hanya merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian, bukan merupakan mata kuliah dasar keahlian dan mata kuliah keahlian, dan kondisi perbedaan latar belakang keagamaan mahasiswanya juga bermacam-macam, dalam arti mahasiswa di PTU lebih bersifat heterogen, jadi dengan keadaan yang seperti itu, sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang religius bernuansa Islam.



A. Latar Belakang

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam rangka mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹ Selain itu Pendidikan Agama Islam juga diimbangi dengan tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan toleransi serta kerukunan antar umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.

Di sisi lain, selama ini telah banyak pemikiran dan kebijakan yang diambil dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan agama Islam yang diharapkan mampu menyelesaikan krisis multidimensional di negara kita, terutama yang menyangkut aspek moral dan etika serta memberikan nuansa baru bagi pengembangan sistem pendidikan di Indonesia. Contohnya seperti banyak munculnya berbagai pemikiran dan kebijakan tentang pengembangan dan pembinaan pendidikan agama Islam pada sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah kebijakan mengenai tujuan kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia yang termuat dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006 dan Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Kedua kebijakan tersebut bermaksud untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama. Namun demikian, dalam praktiknya di sekolah ataupun di perguruan tinggi masih belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kenyataan tersebut menggarisbawahi bahwa di satu sisi beberapa keputusan dan kebijakan yang diambil kadang-kadang terkesan

¹Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2005), hlm. 132.



menggebu-gebu dan idealis, tetapi di sisi lain para pelaksana di lapangan kadang-kadang mengalami beberapa hambatan dan kesulitan untuk merealisasikannya atau bahkan intensitas pelaksanaan dan efektivitasnya masih dipertanyakan.² Hal ini mungkin disebabkan oleh kurangnya kejelasan dan lemahnya pemahaman paradigma (jendela pandang) pengembangan pendidikan agama Islam itu sendiri, yang berimplikasi pada kesalahan orientasi dan langkah, atau ketidakjelasan wilayah dan arah pengembangannya.³

B. Studi Kebijakan dan Model-Model Pengembangan Pendidikan Agama Islam Di Sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU)

Selama ini di Indonesia terdapat beberapa kebijakan yang diambil dan dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama dan sekaligus hendak memberikan kontribusi dalam menjabarkan makna dari pendidikan nasional.

Beberapa kebijakan ditetapkan diantaranya adalah:

1. Kebijakan tentang fungsi pendidikan nasional yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Bab II pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

²Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 53.

³Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 17.



2. Kebijakan tentang tujuan kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia yang termuat dalam Permendiknas No. 23 Tahun 2006, bahwa kelompok mata pelajaran Agama dan Akhlak Mulia bertujuan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yang dicapai melalui muatan atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga, dan kesehatan.⁴
3. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor: 43/DIKTI/Kep/2006 tentang Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) di Perguruan Tinggi bahwa visi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) termasuk di dalamnya pendidikan agama di perguruan tinggi merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia Indonesia seutuhnya.⁵

Beberapa kebijakan tentang pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi yang telah disebutkan di atas sebenarnya sudah idealis, akan tetapi dalam praktik dan implementasinya di lapangan masih belum terealisasi sepenuhnya dengan baik. Di samping itu, berdasarkan Pasal 37 ayat 1 dan 2 di atas, menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran atau bidang studi yang wajib diajarkan dalam setiap kurikulum, jenis, dan jenjang pendidikan. Dengan demikian sudah menjadi keputusan sistemik di Indonesia bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah dan perguruan tinggi umum merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional. Karena sudah ada ketentuan hukum yang secara tegas menjamin dan mewajibkan adanya Pendidikan Agama Islam (PAI) di setiap jalur dan jenjang pendidikan.

⁴Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, hlm. 52.

⁵Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, hlm. 53.



Oleh karena itu, seharusnya mata pelajaran atau bidang studi Pendidikan Agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum tidak hanya diajarkan berdasarkan teorinya saja yang menekankan aspek kognitif atau tidak hanya berupa *transfer of knowledge*, dan tidak hanya lebih menekankan pada aspek *knowing* dan *doing*, akan tetapi harus banyak mengarah pada aspek *being*. Dimana mengubah pengetahuan agama Islam yang kognitif menjadi pengetahuan agama Islam yang lebih banyak menekankan aspek afektif (sikap) yang mengandung makna dan nilai dari pengetahuan agamatersebut yang lebih mendorong penjiwaan terhadap nilai-nilai keagamaan yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik. Pernyataan tentang pendidikan agama sebagai sumber nilai atau pedoman, ternyata belum mewarnai lingkungan dan atmosfer kehidupan sekolah atau perguruan tinggi pada umumnya. Hal ini dirasa sangat diperlukan model-model pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum.

Model-model pengembangan pendidikan agama Islam dimaksudkan untuk memberikan deskripsi tentang pengembangan pendidikan agama Islam melalui potret atau pemetaan paradigma yang ada dan memperjelas orientasi dan wilayah dari masing-masing paradigma tersebut. Dengan demikian, para pemimpin atau pengelola sekolah dan perguruan tinggi dapat melakukan evaluasi diri, paradigma mana yang seharusnya dikembangkan untuk menatap masa depan bangsa Indonesia menuju masyarakat madani.⁶

Model-model pengembangan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) yakni sebagai berikut:⁷

MODEL-MODEL PENGEMBANGAN PAI DI SEKOLAH DAN PERGURUAN TINGGI UMUM (PTU)		
Model Dikotomis	Model Mekanisme	Model Organism/Sistemik
1. Aspek kehidupan	1. Model ini memandang	1. Dalam konteks

⁶Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, hlm. 5.

⁷Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, hlm. 59-67.



<p>dipandang sangat sederhana, dan kata kuncinya adalah dikotomi atau diskrit.</p> <p>2. Segala sesuatu dilihat dari dua sisi yang berlawanan, seperti laki-laki dan perempuan, ada dan tidak ada, pendidikan agama dan pendidikan nonagama, dst.</p> <p>3. Implikasinya pada pengembangan pendidikan Islam yaitu hanya berkisar pada aspek kehidupan ukhrowi yang terpisah dengan kehidupan duniawi. Pendidikan agama Islam hanya mengurus persoalan ritual dan spiritual, sementara kehidupan ekonomi, politik, seni-budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dsb. dianggap sebagai urusan duniawi yang menjadi bidang garap pendidikan non-agama.</p> <p>4. Pandangan dikotomis inilah yang menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, (seperti istilah ilmu agama dan ilmu umum).</p>	<p>kehidupan terdiri dari atas berbagai aspek, dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak dan berjalan menurut fungsinya.</p> <p>2. Aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan itu sendiri terdiri atas: nilai agama, nilai individu, nilai sosial, nilai politik, nilai ekonomi, dll. Dengan demikian, aspek atau nilai agama merupakan salah satu aspek atau nilai kehidupan dari aspek-aspek atau nilai-nilai kehidupan lainnya.</p> <p>3. Hubungan antara nilai agama dengan nilai-nilai lainnya dapat bersifat:</p> <p>a) Horizontal-lateral (independent), mengandung arti bahwa beberapa mata pelajaran (mata kuliah) yang ada dan pendidikan agama mempunyai hubungan sederajat yang independen, dan tidak saling berkonsultasi.</p> <p>b) Lateral-sekuensial, berarti di antara masing-masing mata pelajaran (mata kuliah) tersebut</p>	<p>pendidikan Islam, model <i>organism</i> bertolak dari pandangan bahwa aktivitas kependidikan merupakan suatu sistem yang terdiri atas komponen-komponen yang hidup bersama dan bekerja sama secara terpadu menuju tujuan tertentu, yaitu terwujudnya hidup yang religius atau dijiwai oleh ajaran dan nilai-nilai agama.</p> <p>2. Pandangan semacam itu menggarisbawahi pentingnya kerangka pemikiran yang dibangun dari <i>fundamental doctrines</i> dan <i>fundamental values</i> yang tertuang dan terkandung dalam Al-Qur'an dan <i>al-sunnah ash-shahihah</i> sebagai sumber pokok.</p> <p>3. Ajaran dan nilai-nilai agama didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai insani yang mempunyai hubungan vertikal-linier dengan nilai agama.</p> <p>4. Melalui upaya tersebut, maka sistem</p>
---	--	--



	<p>mempunyai relasi sederajat yang bisa saling berkonsultasi.</p> <p>c) <i>Vertikal-linier</i>, berarti mendudukkan pendidikan agama sebagai sumber nilai atau sumber konsultasi, sementara seperangkat mata pelajaran (mata kuliah) yang lain adalah termasuk pengembangan nilai-nilai insani yang mempunyai relasi vertikal-linier dengan agama.</p>	<p>pendidikan Islam diharapkan dapat mengintegrasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan, nilai agama dan etik, serta mampu melahirkan manusia yang menguasai dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki kematangan profesional, dan sekaligus hidup di dalam nilai-nilai agama.</p>
--	--	---

Berbagai krisis multidimensional yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia memang tidak bisa hanya dilihat dan diatasi melalui pendekatan *mono-dimensional*. Namun demikian, karena segala krisis tersebut berpangkal dari krisis akhlak atau moral, maka pendidikan agama dipandang memiliki peranan yang sangat vital dalam membangun watak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Untuk itu, diperlukan pengembangan pendidikan agama yang lebih kondusif dan prospektif terutama di sekolah atau perguruan tinggi. Model pengembangannya perlu direkonstruksi, dari model yang bersifat dikotomik dan mekanisme ke arah model organisme atau sistemik. Hanya saja untuk merombak model tersebut diperlukan kemampuan dan *political will* dari para pengambil kebijakan, termasuk di dalamnya para pemimpin lembaga pendidikan itu sendiri.⁸

C. Implementasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah

Pendidikan agama di sekolah umum dapat dikategorikan sebagai bagian dari pendidikan Islam, dalam kaitannyadengan tujuan mengembangkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., Tuhan Yang

⁸Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, hlm. 71.



Mahakuasa. Kategori sebagai pendidikan Islam ini terutama dilihat dari pengertian pendidikan Islam dari sudut filosofisnya, bahwa esensi pendidikan Islam adalah untuk mengembangkan pribadi muslim yang memahami ajaran agamanya dan dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengabdian kepada Allah, Sang Pencipta.⁹ Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dewasa ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan nasional, tidak terkecuali di sekolah umum baik Negeri maupun Swasta, serta baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.

Kewajiban penyelenggara pendidikan untuk mengadakan kurikulum pendidikan agama sejalan dengan kurikulum wajib lainnya menunjukkan perhatian yang besar dari para pembuat kebijakan negara terhadap pentingnya arti pendidikan agama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional itu sendiri.¹⁰ Kurikulum dan materi pendidikan agama yang dituangkan ke dalam bentuk GBPP (Garis-Garis Besar Program Pembelajaran) merujuk kepada kebijakan pemerintah. Arah, tujuan, dan ruang lingkup materi pendidikan agama Islam dapat dilihat dari GBPP 1994 dan 1999. Dalam GBPP Pendidikan Agama Islam 1994 disebutkan tujuan pendidikan agama Islam, yaitu untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam GBPP 1999, rumusan tersebut lebih diringkas lagi dengan kandungan pengertian yang tidak berbeda, yaitu agar siswa memahami, menghayati,

⁹Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 119.

¹⁰Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam*, hlm. 137.



meyakini, dan mengamalkan ajaran Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt., dan berakhlak mulia.¹¹

Dari penjelasan tentang tujuan pendidikan agama Islam di sekolah diatas tampaknya dalam realisasi serta implementasinya di lapangan masih belum tercapai dengan baik. Materi dari kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah umum, yang merupakan pembekalan untuk membentuk sosok pribadi muslim yang beriman dan mengamalkan ajaran agamanya, di dalam praktik pembelajaran yang hanya mendapatkan alokasi waktu 2 jam pelajaran per minggu mencakup aspek yang luas dan karenanya menjadi sangat padat materi, dan lebih berorientasi pada aspek kognitif. Hal ini menjadikan penyelenggaraan pendidikan agama Islam kurang terarah bagi pencapaian ketiga ranah pendidikan, yaitu aspek kognitif (pengetahuan), afektif, dan psikomotorik (penghayatan dan pembentukan perilaku dan tindakan pengamalan ajaran).

Oleh karena itu sebaiknya dalam implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah umum perlu dikembangkan lagi dengan beberapa cara dan model pengembangan agar tujuan dari pendidikan nasional itu dapat tercapai dengan baik, serta agar pembelajaran pendidikan agama Islam tersebut selain menyampaikan pengetahuan tentang agama Islam itu sendiri, juga dapat menumbuhkan kemauan dan tekad dalam diri peserta didik untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Pengembangan pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah sangat diperlukan untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait implementasinya di lapangan. Untuk mencapai keberhasilan pendidikan agama banyak sekolah mengembangkan pembiasaan budaya agama (*religious culture*) di sekolah yang mendukung proses pendidikan agama yang memenuhi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang tergambar

¹¹Nurhayati Djamas, *Dinamika Pendidikan Islam*, hlm. 139.



pada sikap dan perilaku para siswa. Pembiasaan budaya agama (*religious culture*) yang dikembangkan di sekolah-sekolah umum contohnya seperti pembiasaan pemberlakuan tradisi ritual keagamaan tertentu, membaca do'a sebelum memulai pelajaran, shalat berjamaah di sekolah, peringatan hari besar Islam, dsb.

Selain itu, kegiatan (pembelajaran) pendidikan agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, yang disamping untuk membentuk kesalehan atau kualitas pribadi, juga sekaligus untuk membentuk kesalehan sosial.¹² *Kesalehan pribadi* mengandung makna seseorang muslim yang baik, yang memiliki komitmen untuk memperbaiki, meningkatkan serta mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya sekaligus meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaannya secara berkelanjutan. Sedangkan *kesalehan sosial* mengandung makna seseorang yang kreatif tersebut memiliki kepedulian untuk berhubungan secara harmonis dengan lingkungan sosial dan alam sekitarnya, sekaligus mampu ikut bertanggung jawab terhadap pengembangan masyarakatnya atau memiliki keunggulan *partisipatoris* yang dilandasi oleh tingginya kualitas iman dan taqwa terhadap Allah Swt.¹³

Karena itu, pengembangan pendidikan agama Islam diharapkan agar mampu menciptakan *ukhuwah islamiyah* dalam arti luas, yakni persaudaraan yang bersifat Islami, bukan sekedar persaudaraan antar umat Islam sebagaimana yang selama ini dipahami, serta mampu membentuk kesalehan pribadi sekaligus kesalehan sosial.¹⁴ Hal ini mengingat bahwa pada dasarnya masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang serba plural, masyarakat

¹²Muhaimin, *et.al.*, *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012), hlm. 76.

¹³Muhaimin, *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2004), hlm. 173.

¹⁴Muhaimin, *Wacana Pengembangan*, hlm. 172.



yang berbeda-beda agama, ras, etnis, tradisi, dan budaya, tetapi bagaimana melalui keragaman ini dapat dibangun suatu tatanan hidup serta toleransi yang dinamis dalam membangun bangsa Indonesia.

D. Implementasi Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum

Perguruan tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang secara formal disertai tugas dan tanggung jawab mempersiapkan mahasiswa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengisi kebutuhan masyarakat akan tersedianya tenaga ahli dan tenaga terampil dengan tingkat dan jenis kemampuan yang sangat beragam. Berdasarkan hal tersebut, struktur perguruan tinggi di Indonesia dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori yaitu: *Pertama*, Perguruan Tinggi Umum (PTU) yang dikelola oleh Departemen Pendidikan Nasional. *Kedua*, Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yang dikelola oleh Departemen Agama.¹⁵ Pengelompokan perguruan tinggi di Indonesia seperti ini berimbas kepada jenis penyelenggaraan pendidikan agama, tujuan serta kurikulum pendidikan agama pada dua kelompok perguruan tinggi tersebut.

Implementasi pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) antara di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dan di Perguruan Tinggi Umum (PTU) sangatlah berbeda. Hal ini dapat dilihat dari tujuan penyelenggaraan pendidikan agama Islam yang berbeda dari dua kelompok perguruan tinggi tersebut, dimana tujuan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) yaitu mencetak para ahli agama (*ulama*) dalam semua tingkat, kurikulumnya juga lebih dominan menekankan aspek keagamaan Islam serta nuansa dan lingkungan yang religius juga lebih kentara (tampak) di kampus atau universitas yang berciri khas agama Islam.

Berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU), dimana bertujuan untuk memenuhi

¹⁵Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), hlm. 236.



kewajiban setiap orang mengetahui dasar-dasar ajaran agamanya sebagai seorang pemeluk agama, kurikulum pendidikan agama Islam di Perguruan Tinggi Umum (PTU) hanya merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian, bukan merupakan mata kuliah dasar keahlian dan mata kuliah keahlian, dan kondisi perbedaan latar belakang keagamaan mahasiswanya juga bermacam-macam, dalam arti mahasiswa di PTU lebih bersifat heterogen, jadi dengan keadaan yang seperti itu, sangat sulit untuk menciptakan lingkungan yang religius bernuansa Islam.

Struktur pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya yang bersifat umum, memberikan kemampuan bagi mahasiswa untuk mempelajari suatu bidang ilmu yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Hal ini tercermin dari sejumlah program studi yang disediakan oleh perguruan tinggi yang kurikulum nasionalnya telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional (untuk Program Sarjana). Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa. Apabila ditinjau dari kurikulum pendidikan tinggi tersebut, tampak bahwa mata kuliah agama dan etika merupakan mata kuliah wajib di seluruh perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memandang penting agama dan etika dalam proses pendidikan tinggi, dengan harapan bahwa mahasiswa akan mempunyai penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang baik disertai dengan keimanan dan ketakwaan (Imtak) yang mendalam. Hal ini menjadi tolak ukur sosok manusia Indonesia yang seutuhnya dan diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan dunia.¹⁶

Dalam struktur kurikulum nasional pendidikan tinggi, matakuliah pendidikan agama Islam merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, disetiap jurusan, program dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri

¹⁶Samsul Nizar dan Muhammad Syarifudin, *Isu-Isu Kontemporer*, hlm. 237.



maupun di swasta. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memandang penting pendidikan agama diajarkan di perguruan tinggi umum.¹⁷

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat sekarang ini menghadapkan manusia kepada situasi yang cepat berubah, sehingga pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya dalam masyarakat tidak dapat dihindarkan lagi. Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai universal yang mengacu kepada petunjuk wahyu semakin kuat peranannya, karena ia memberikan dasar-dasar moralitas yang kokoh dalam melestarikan harkat dan martabat manusia yang tinggi dan menyelamatkannya dari degradasi nilai dan demoralisasi yang biasanya menyertai kemajuan Iptek. Oleh karena itu, peran PAI, khususnya di perguruan tinggi umum (PTU) semakin penting. Terlebih lagi bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dimana pendidikan tidak hanya menghendaki terwujudnya sarjana yang cerdas dan terampil saja, melainkan sosok pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk mencapainya tentu saja melalui pendidikan nilai-nilai agama, dalam hal ini Pendidikan Agama Islam.¹⁸

Namun demikian, hal terpenting yang perlu ditekankan adalah bagaimana mengemas dan mengisi mata kuliah agama dan etika Islam agar mampu menjawab tantangan perkembangan dunia, dengan sedikitnya SKS terkait pendidikan agama Islam di perguruan tinggi umum (PTU). Hal ini sebagaimana pada pelaksanaan Pendidikan Agama Islam (PAI) di UI (Universitas Indonesia), dimana PAI yang bermuatan 2 (dua) SKS diberikan dalam satu semester yang diambil mahasiswa pada semester 3 ke atas. Dalam satu semester terdapat paling banyak 14 kali pertemuan.¹⁹

¹⁷Artikel SyukriFathudinAchmadWidodo, *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*, hlm. 5.

¹⁸Samsul Nizar dan Muhammad Syaifudin, *Isu-Isu Kontemporer*, hlm. 242-243.

¹⁹Marwan Saridjo, *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam*, (Bogor: Yayasan Ngali Aksara dan al-Manar Press, 2011), hlm. 239.



Menurut idealnya, Pendidikan Agama Islam (PAI) menempati posisi kunci dan penting, terintegrasi secara fungsional dengan berbagai disiplin ilmu atau bidang studi dan berperan menentukan kelulusan. Namun dalam kenyataannya dalam pelaksanaannya, pendidikan agama Islam masih menempati posisi marginal (pinggiran), teralienasi (terasing), dan tidak menentukan kelulusan. Selain itu, mata kuliah pendidikan agama Islam bukanlah mata kuliah keahlian, tetapi hanya merupakan mata kuliah umum yang bersifat melayani dan tidak berpengaruh dalam menentukan kelulusan atau keserjanaan seorang mahasiswa.

Dilihat dari visi pendidikan agama sebagai bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian (MPK) di perguruan tinggi umum (PTU) tersebut, maka idealnya PAI di PTU dikembangkan ke model organisme atau sistemik, yang menjadikan PAI sebagai sumber nilai dan pedoman bagi penyelenggaraan program studi serta membantu peserta didik (calon sarjana) agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Akan tetapi realitas di lapangan, fenomena yang ada menunjukkan bahwa pada umumnya PAI di PTU dilaksanakan dengan menggunakan model dikotomis atau mekanisme, meskipun ada beberapa yang PTU yang menggunakan model organisme/sistemik. Hal ini setidaknya-tidaknya dapat diamati dari pelaksanaan pendidikan di PTU yang mana nilai-nilai agama belum mampu mewarnai pengembangan program studi-program studi yang ada, dan belum mampu mewujudkan nilai dasar agama dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.²⁰

E. Kesimpulan

²⁰Muhaimin, *Rekonstruksi Pendidikan Islam*, hlm. 69.



Setelah mengkaji tentang studi kebijakan pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah dan perguruan tinggi umum (PTU) ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa kebijakan yang diambil dan dikembangkan di Indonesia dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan agama dan sekaligus hendak memberikan kontribusi dalam menjabarkan makna dari pendidikan nasional.
2. Model-model pengembangan Pendidikan Agama Islam di sekolah dan Perguruan Tinggi Umum (PTU) yakni model dikotomis, model mekanisme, dan model organism atau sistemik.
3. Penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah umum dewasa ini diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan salah satu mata pelajaran wajib yang harus diajarkan di setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan nasional, tidak terkecuali di sekolah umum baik Negeri maupun Swasta, serta baik pada jenjang pendidikan dasar maupun menengah.
4. Dalam struktur kurikulum nasional pendidikan tinggi, matakuliah pendidikan agama Islam merupakan mata kuliah wajib diikuti oleh semua mahasiswa yang beragama Islam di seluruh perguruan tinggi umum, di setiap jurusan, program dan jenjang pendidikan, baik di perguruan tinggi negeri maupun di swasta. Hal itu menunjukkan bahwa pemerintah memandang penting pendidikan agama diajarkan di perguruan tinggi umum.

DAFTAR PUSTAKA



Andayani, Dian dan Abdul Majid. 2005. *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi (Konsep dan Implementasi Kurikulum 2004)*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Djamas, Nurhayati. 2009. *Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia Pascakemerdekaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ismail. 2009. *Implementasi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Menengah Umum (SMU) (Problematika dan Pemecahannya)*. Jurnal Vol. 7, No. 1, Juni FORUM TARBIYAH.

Muhaimin. 2009. *Rekonstruksi Pendidikan Islam: Dari Paradigma Pengembangan, Manajemen Kelembagaan, Kurikulum hingga Strategi Pembelajaran*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhaimin. 2005. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Muhaimin, *et.al.*. 2012. *Paradigma Pendidikan Islam: Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama Islam di Sekolah*. Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA.

Muhaimin. 2004. *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.

Syaifudin, Muhammad dan Samsul Nizar. 2010. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.

Saridjo, Marwan. 2011. *Pendidikan Islam dari Masa ke Masa: Tinjauan Kebijakan Publik terhadap Pendidikan Islam*. Bogor: Yayasan Ngali Aksara dan al-Manar Press.

Widodo, SyukriFathudinAchmad. Artikel *Manajemen Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum*.